



GERAKAN SOSIAL PEREMPUAN DALAM KONFLIK LAHAN DI DESA KOTO GARO KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR

Jean Geovani, Hesti Asriwandari

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Abstrak

Konflik lahan antara masyarakat Desa Koto Garo dan perusahaan perkebunan kelapa sawit melalui skema KKPA telah menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang signifikan, terutama bagi perempuan yang kehilangan akses terhadap lahan dan sumber penghidupan. Situasi konflik yang berlarut menjadikan perempuan tidak hanya sebagai korban, melainkan juga sebagai penggerak utama yang memobilisasi aksi kolektif untuk mempertahankan hak-haknya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis latar belakang kemunculan gerakan sosial perempuan dalam konflik lahan, bentuk-bentuk aksi yang dijalankan, serta strategi yang digunakan dalam menghadapi perusahaan dan pemerintah dengan menggunakan analisis teori deprivasi relatif dan mobilisasi sumber daya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, dengan subjek penelitian berjumlah 6 orang yang terdiri dari pengurus koperasi, tokoh perempuan, niniak mamak, dan perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam pembagian lahan, beban hutang koperasi, serta lemahnya mediasi antar masyarakat dan perusahaan menjadi faktor pendorong munculnya rasa deprivasi yang kemudian memicu perlawanan kolektif. Gerakan perempuan di Koto Garo terwujud melalui aksi protes, rapat koperasi, penjagaan lahan, serta mobilisasi jaringan solidaritas komunitas. Gerakan sosial ini merupakan bentuk resistensi terhadap ketidakadilan struktural sekaligus strategi perempuan mempertahankan keberlangsungan hidup komunitas.

Kata Kunci: Gerakan sosial, Perempuan, Konflik lahan.

PENDAHULUAN

Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang dikenal sebagai salah satu kawasan strategis yang ditopang oleh sektor kehutanan dan perkebunan, terutama kelapa sawit. Posisi geografisnya yang berbatasan dengan sentra-sentra produksi lain di Riau membuat Kampar menjadi simpul penting arus ekonomi pedesaan, migrasi kerja, serta perubahan tata guna lahan. Kondisi ini menjadikan wilayah tersebut sebagai penghasil kelapa sawit terbesar ketiga di Riau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi perkebunan kelapa sawit di Kampar mencapai sekitar 3.104.000 ton pada tahun 2024 (Darnia et al., 2024).

Tingginya jumlah produksi kelapa sawit di Kabupaten Kampar mendorong berdirinya banyak perusahaan perkebunan di wilayah ini. Tercatat ada 36 perusahaan yang ikut berkontribusi dalam menyumbang angka produksi tersebut. Pengelolaan komoditas kelapa sawit di Kampar didominasi oleh perkebunan besar milik negara (PBN) maupun swasta (PBS). Kedua jenis perusahaan ini berperan sebagai pemilik modal yang mengelola dan mengembangkan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar, sehingga memerlukan lahan yang luas untuk mendukung keberlangsungan usaha perkebunan tersebut (Suardi et al., 2023).

Keberadaan puluhan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar, baik swasta maupun milik negara, mencerminkan tingginya arus investasi di sektor agribisnis. Namun, ekspansi besar-besaran tersebut tidak terlepas dari berbagai persoalan struktural yang memicu konflik agraria, khususnya sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat setempat. Konflik ini tersebar di hampir seluruh kecamatan di Kampar, termasuk

wilayah Tapung, Kampar Kiri, hingga daerah perbatasan dengan kabupaten lain (Dharmawan & Barus, 2020).

Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi konflik lahan adalah ketidakjelasan status kepemilikan tanah. Banyak perusahaan memperoleh izin konsesi dari pemerintah tanpa melalui proses konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat atau petani yang sebelumnya telah mengelola lahan tersebut. Tidak jarang masyarakat merasa tanah ulayat mereka diambil alih secara sepihak. (Shani et al., 2024).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Deprivasi Relatif dari Gurr sebagai kerangka utama untuk menjelaskan kemunculan dan arah gerakan sosial perempuan di Desa Koto Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Teori ini memformulasikan alur kausal yang jelas. 1. Meningkatnya nilai ekspektasi menumbuhkan standar baru tentang apa yang dipandang adil, misalnya kepastian hak atas lahan, transparansi bagi hasil, dan skema kredit yang wajar. 2. Jika nilai kapabilitas tidak sejalan, misalnya akses kebun tidak pasti, dokumen sulit dijangkau, informasi tidak merata, dan posisi tawar lemah, maka terbentuk jurang ekspektasi dan kapabilitas. 3. Jurang tersebut melahirkan ketidakpuasan kolektif yang, ketika bertemu peluang politik, jejaring sosial, dan dukungan organisasi, bertransformasi menjadi mobilisasi aksi.

Dengan demikian, **teori deprivasi relatif** membantu menjelaskan akar munculnya keresahan kolektif akibat ketimpangan yang dialami, sementara **teori mobilisasi sumber daya** memberi kerangka untuk memahami bagaimana keresahan itu diubah menjadi aksi nyata melalui organisasi, solidaritas, dan strategi perjuangan. Kedua teori ini saling melengkapi dalam membaca dinamika

gerakan sosial perempuan dalam konflik lahan di Desa Koto Garo.

Teori mobilisasi sumber daya juga mengedepankan pentingnya elemen-elemen struktural seperti kesiapan sumber daya untuk keadaan kolektif dan kedudukan dalam sebuah jaringan sosial, kemudian mengutamakan objektivitas mengenai kontribusi dalam gerakan sosial. Para individu yang terlibat atau berkontribusi dalam suatu gerakan sosial harus menetapkan sebuah keputusan untuk ikut serta atau tidak, karena hal tersebut berpengaruh terhadap keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh tiap individu yang bergabung kedalam suatu gerakan social. Teori mobilisasi sumber daya dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana KP2-SL mengatur, memanfaatkan, serta mendistribusikan sumber daya yang dimiliki dalam rangka memperjuangkan hak-hak mereka. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk Menguraikan latarbelakang aktor perempuan bergerak pada konflik organisasi dan menganalisis bentuk-bentuk aksi gerakan Kelompok Tani KP2-SL.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif–studi kasus untuk memahami dinamika gerakan sosial perempuan dalam konflik lahan di Desa Koto Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Subjek penelitian terdiri dari **6 informan** yang dipilih dengan teknik purposive sampling, meliputi **4 informan utama** dan **2 informan pendukung**. Selain itu, ditetapkan **3 informan kunci perempuan** yang memiliki peran strategis dalam gerakan sosial, yakni sebagai petani aktif, pengelola logistik aksi, serta tokoh perempuan senior yang merekam kronologi konflik. Data penelitian diperoleh melalui wawancara

mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Data primer berupa pengalaman dan narasi langsung dari informan, sedangkan data sekunder mencakup dokumen koperasi, profil desa, serta literatur terkait. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan secara berulang hingga mencapai titik kejenuhan. Keabsahan data dijaga melalui penerapan triangulasi sumber, metode, dan teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Gerakan Sosial Perempuan di Desa Kota Garo

Gerakan sosial perempuan di Desa Koto Garo lahir bukan secara tiba-tiba, melainkan akibat akumulasi tekanan sosial, ekonomi, dan politik yang mereka alami. Seperti diungkapkan Molyneux (1985), keterlibatan perempuan dalam gerakan sering dipicu pengalaman langsung menghadapi ketidakadilan, termasuk kehilangan akses sumber daya dan keterpinggiran dalam pengambilan keputusan. Konflik lahan yang berkepanjangan di desa ini memperburuk kondisi perempuan, mulai dari hilangnya penghidupan hingga melemahnya posisi sosial. Dalam situasi tersebut, perempuan tampil bukan hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai aktor yang memperjuangkan hak, membangun solidaritas, serta menjaga keberlangsungan komunitas.

1. Konflik Masyarakat Dengan Perusahaan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai Konflik Masyarakat dengan Perusahaan di Desa Koto Garo, berikut disajikan akar dari persoalan konflik lahan ini bermula pada tahun 2003, ketika sebuah perusahaan menjanjikan akan menyerahkan 20% dari lahan yang mereka kelola kepada masyarakat dalam bentuk kebun plasma. Janji tersebut menjadi dasar utama masyarakat

menyetujui dan menerima skema kemitraan melalui program KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya). Harapan masyarakat saat itu adalah dapat memiliki kebun sawit sendiri yang akan dikelola bersama koperasi, dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Setelah masyarakat menyerahkan lahan konsesi mereka kepada perusahaan, kebun plasma mulai dibangun di atas lahan tersebut. Namun, pembangunan kebun tidak dibiayai oleh perusahaan secara langsung, melainkan melalui pinjaman dari bank yang dibebankan kepada koperasi. Pinjaman ini menjadi utang jangka panjang yang harus dibayar oleh koperasi melalui hasil panen sawit dari kebun KKPA tersebut. Artinya, meskipun kebun telah dibangun, keuntungan yang diharapkan masyarakat belum dapat dinikmati karena seluruh hasil panen dialokasikan untuk membayar utang. Situasi ini dapat dianalisis menggunakan **Teori Deprivasi Relatif** sebagaimana dijelaskan Ted Robert Gurr. Teori ini menekankan bahwa akar ketidakpuasan sosial bukanlah kemiskinan absolut, melainkan kesenjangan antara harapan (*value expectations*) dan kenyataan kemampuan yang diperoleh (*value capabilities*). Dalam kasus Koto Garo, masyarakat menaruh harapan besar pada janji plasma 20% dan peningkatan kesejahteraan, tetapi kenyataan menunjukkan mereka justru dibebani utang tanpa menikmati hasil. Jurang yang lebar antara ekspektasi dan capaian inilah yang menimbulkan perasaan kecewa, frustrasi, dan marah, yang kemudian berkembang menjadi gerakan sosial perempuan. Hasil penelitian Damantu & Arief (2025) juga memperlihatkan pola serupa, bahwa janji perusahaan perkebunan yang tidak terealisasi melahirkan kondisi deprivasi relatif dan menjadi pemicu aksi kolektif

masyarakat dalam menolak dominasi perusahaan

A. Faktor Ekonomi dan Sosial

Konflik agraria di Indonesia merupakan cerminan dari ketimpangan struktural yang telah berlangsung lama. Ketimpangan ini bukan sekadar menyangkut distribusi kepemilikan lahan, tetapi juga berkaitan dengan akses terhadap sumber daya, pengambilan keputusan, dan kesejahteraan ekonomi. Dalam dua dekade terakhir, meningkatnya konflik lahan yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit menunjukkan bahwa program-program kemitraan seperti KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) tidak selalu memberikan keadilan kepada masyarakat.

1. Faktor Ekonomi

Dari sisi ekonomi, masyarakat Koto Garo mengalami penurunan pendapatan karena hasil panen sawit dialokasikan sepenuhnya untuk melunasi utang koperasi. Harapan untuk menikmati hasil kebun plasma tidak pernah terwujud, sehingga banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini sejalan dengan konsep **decremental deprivation** dalam Teori Deprivasi Relatif, di mana masyarakat kehilangan hak dan akses ekonomi yang sebelumnya mereka harapkan (Imang et al., 2019).

2. Faktor Sosial

Selain kerugian ekonomi, konflik ini juga menimbulkan keresahan sosial yang signifikan. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap koperasi maupun perusahaan, bahkan hubungan antarwarga ikut terganggu akibat perbedaan pandangan dalam menyikapi konflik. Perempuan, yang terdampak langsung oleh beban rumah tangga, muncul sebagai aktor penting dalam mobilisasi aksi kolektif. Kondisi ini

menggambarkan bentuk **progressive deprivation**, yaitu meningkatnya harapan sosial terhadap keadilan dan partisipasi, sementara realitas justru memperburuk posisi masyarakat dalam relasi kekuasaan. Hasil penelitian Shani et al. (2024) memperkuat temuan ini, bahwa konflik agraria di Senama Nenek juga dipicu oleh kekecewaan sosial akibat janji plasma yang tidak terealisasi dan lemahnya mediasi pemerintah, sehingga menciptakan solidaritas kolektif yang tumbuh dari pengalaman privasi bersama

B. Bentuk-Bentuk Gerakan Sosial

1. Demonstrasi

Aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat Desa Koto Garo, khususnya perempuan, dalam menghadapi PT Sekar Bumi Alam Lestari dapat dipahami sebagai bentuk nyata dari mobilisasi sumber daya. Demonstrasi tersebut tidak lahir secara spontan, melainkan melalui pengorganisasian yang melibatkan koordinasi rapat koperasi, pembagian peran, hingga pengelolaan logistik aksi. Perempuan memainkan peran penting dalam mengatur jalannya protes, mulai dari mengorganisir peserta, menjaga solidaritas kelompok, hingga membangun jaringan dukungan dengan aktor-aktor lokal seperti niniak mamak dan perangkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan aksi protes sangat bergantung pada kemampuan komunitas untuk memanfaatkan sumber daya sosial, manusia, dan kultural yang tersedia.

Dalam perspektif **Teori Mobilisasi Sumber Daya**, aksi demonstrasi ini menggambarkan bagaimana gerakan sosial memanfaatkan peluang dan kapasitas yang dimiliki untuk memperkuat perlawanan. McCarthy dan Zald menekankan bahwa efektivitas gerakan tidak hanya ditentukan oleh tingkat

ketidakadilan yang dirasakan, tetapi juga oleh sejauh mana sumber daya dapat dimobilisasi untuk tujuan kolektif (Maulana & Shohibuddin, 2024)

2. Pemblokiran Jalan

Pemblokiran akses jalan merupakan salah satu bentuk aksi langsung yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam merespons konflik lahan perkebunan di Indonesia. Aksi ini biasanya muncul sebagai bentuk protes terhadap perusahaan perkebunan yang dianggap melanggar kesepakatan, merugikan hak-hak masyarakat adat, atau mengabaikan tuntutan warga lokal. Pemblokiran jalan menjadi strategi simbolik dan praktis untuk menekan perusahaan, karena dapat mengganggu operasional seperti distribusi hasil panen, logistik perusahaan, dan aktivitas produksi lainnya.

3. Panen Massal

Dalam berbagai kasus konflik agraria di Indonesia, tindakan panen massal oleh masyarakat bukanlah fenomena baru. Aksi ini sering muncul sebagai reaksi atas ketidakadilan yang dirasakan oleh petani atau warga yang menjadi bagian dari program kemitraan dengan perusahaan besar. Ketika jalur hukum dan dialog tidak membuahkan hasil, panen massal muncul sebagai strategi langsung masyarakat untuk menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kontrol atas tanah atau hasil kebun yang mereka perjuangkan.

Panen massal biasanya dilakukan secara kolektif dan simbolik. Ia bukan sekadar proses mengambil hasil sawit, melainkan bentuk protes sosial yang menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang antara perusahaan dan masyarakat.

Analisis Gerakan Sosial Perempuan Berdasarkan Teori Deprivasi Relatif

Gerakan sosial perempuan di Desa Koto Garo dapat dipahami secara lebih mendalam melalui perspektif teori deprivasi relatif. Kerangka ini, yang diperkenalkan oleh Ted Robert Gurr dan diperkaya oleh pemikiran Robert K. Merton, menjelaskan bahwa sumber utama ketidakpuasan sosial bukanlah kemiskinan absolut atau keterbatasan material semata, melainkan adanya kesenjangan antara harapan (*value expectations*) dengan kemampuan nyata untuk mewujudkan harapan tersebut (*value capabilities*). Relevansi pembahasan mengenai deprivasi relatif dalam kasus Koto Garo dapat dilihat dari kesamaan pola dengan penelitian Damantu dan Arief (2025) di Desa Lembobelala. Keduanya memperlihatkan bagaimana janji perusahaan mengenai plasma atau kompensasi lahan membentuk ekspektasi kesejahteraan kolektif, tetapi realitas di lapangan justru menghasilkan kekecewaan, beban utang, dan diskriminasi akses

Analisis Bentuk-Bentuk Gerakan Sosial Perempuan di Desa Koto Garo Berdasarkan Teori Mobilisasi Sumber Daya

Teori mobilisasi sumber daya menekankan bahwa keberhasilan suatu gerakan sosial bergantung pada kemampuan kolektif aktor-aktornya dalam menghimpun, mengorganisasi, dan memanfaatkan berbagai sumber daya, baik berupa sumber daya manusia, material, jaringan, maupun legitimasi politik dan kultural (McCarthy & Zald, 1977).

Dalam konteks gerakan perempuan Desa Kota Garo, penerapan teori ini tampak melalui serangkaian aksi yang dilakukan secara terstruktur dan strategis. Perempuan yang sebelumnya tidak terlibat dalam gerakan agraria karena keterbatasan peran sosial berbasis gender, kemudian mengalami transformasi peran setelah muncul

kesadaran kolektif. Kesadaran ini tumbuh melalui identifikasi pengalaman bersama serta pengaruh dari keterlibatan perempuan lain yang lebih dahulu aktif. Hal ini menunjukkan adanya mobilisasi sumber daya manusia dan emosional sebagai penggerak awal partisipasi.

SIMPULAN

Konflik agraria di Desa Koto Garo berakar pada ketimpangan penguasaan lahan, skema KKPA yang menjerat petani dalam utang, serta minimnya transparansi pengelolaan perusahaan dan koperasi, sehingga penyelesaiannya tidak cukup dengan pendekatan legal-formal melainkan menuntut reforma agraria yang adil dan partisipatif.

Melalui **Teori Deprivasi Relatif**, gerakan sosial dipahami lahir dari jurang antara janji kesejahteraan dan kenyataan penindasan yang menimbulkan kekecewaan kolektif, sedangkan **Teori Mobilisasi Sumber Daya** menjelaskan bagaimana aksi perlawanan dapat bertahan karena masyarakat mampu menghimpun solidaritas, tenaga, jaringan, serta legitimasi moral perempuan sebagai sumber daya strategis. Hal ini menegaskan bahwa keterlibatan perempuan tidak hanya menjadi ekspresi melawan ketidakadilan, tetapi juga motor penggerak perjuangan agraria yang terorganisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Darnia, M. E., Tsurayya, A., Mustafarsyach, M. A., Utami, R. W., & Putri, R. A. (2024). Analisa Sengketa Lahan Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 430-434. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12731220>

Dharmawan, A. H., & Barus, B. (2020). *Ekspansi dan Konflik pada Perkebunan Kelapa Sawit: Kasus di Desa Terantang Manuk* ,

Kabupaten Pelalawan , Riau A Case in Terantang Manuk Village , Pelalawan District , Riau. 08(03), 167-178.

Imang, N., Balkis, S., & Maliki, M. (2019). Analisis Implementasi Pola Kemitraan dan Pendapatan Petani Plasma Kelapa Sawit di Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan timur. *Jurnal Pertanian Terpadu*, 7(1), 112-121. <https://doi.org/10.36084/jpt.v7i1.187>

Maulana, I. R., & Shohibuddin, M. (2024). Pengaruh Gerakan Petani terhadap Trajectory Perjuangan Reforma Agraria(Kasus Desa Cisarua, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor). *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 8(02), 49-61. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v8i02.1504>

Shani, F. M., Afrianto, A., Dwijananti, B. M., & Kustiwan, I. (2024). Mengurai Konflik Agraria di Desa Senama Nenek dengan Pendekatan Drivers-Pressures-State-Impact-Responses (DPSIR). *Tunas Agraria*, 7(2), 221-240. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.310>

Suardi, T. F., Sulistyowati, L., Noor, T. I., & Setiawan, I. (2023). Rasionalitas Petani Kelapa Sawit. *Jurnal Departemen Sosial Ekonomi Pertanian*, 1, 273-284.